

## PEMECAHAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

<sup>1</sup>Surianti Siregar, <sup>2</sup>Zulhamri, <sup>3</sup>Masdingin

<sup>1,2,3</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail : [siregarsurianti81@gmail.com](mailto:siregarsurianti81@gmail.com),

E-mail : [zul.amri21@gmail.com](mailto:zul.amri21@gmail.com),

E-mail : [masdingin32@gmail.com](mailto:masdingin32@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya, dan pernyataan itu sangat diyakini oleh bangsa ini. Pendidikan Kesetaraan dalam pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Tulisan ini akan memuat bagaimana pemecahan permasalahan pendidikan Nonformal dalam kebijakan pendidikan nasional, meliputi: Pentingnya Pendidikan Nonformal, Pemecahan Pendidikan Nonformal dalam Kebijakan Pendidikan Nasional yang termasuk didalamnya Membangun Citra Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Meningkatkan Reputasi Akademik.

**Kata Kunci:** Pemecahan Permasalahan, Pendidikan Non Formal, Kebijakan Pendidikan Nasional

### Abstract

Education is a strategic means to improve the quality of a nation. Therefore, the progress of a nation can be measured by the progress of its education, and this statement is strongly believed by this nation. Equality education in non-formal education which includes Package A, Package B and Package C programs with an emphasis on mastering knowledge, functional skills and developing students' professional attitudes and personalities. This article will contain how to solve non-formal education problems in national education policy, including: The importance of non-formal education, solving non-formal education in national education policy which includes building the image of non-formal education providing institutions, improving the quality and quantity of educators and non-formal education education staff and increasing reputation academic.

**Keywords:** Problem Solving, Non-Formal Education, National Education Policy

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu negara. Jadi, kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemajuan pendidikannya dan negara tersebut sangat meyakini pernyataan tersebut. Namun kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia belum membawa hasil yang diharapkan. Sistem pendidikan ini gagal meningkatkan sumber daya manusia yang handal, apalagi menciptakan kualitas bagi negara. Undang-undang Pendidikan Nomor Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk pembelajaran Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, diri. -pengendalian, budi pekerti, kecerdasan, keluhuran moral dan hal-hal yang diperlukan. kualitas. keterampilan diri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Dengan adanya penurunan kualitas pendidikan, masyarakat tidak puas terhadap pendidikan nasional. Untuk mengungkapkan ketidakpuasannya itu banyak masyarakat mencari terobosan baru untuk menyekolahkan anak-anaknya ke suatu lembaga yang lebih baik, maka ada pendidikan informal maupun nonformal. Salah satu alternatif yang dicari orang tua untuk mengarahkan anaknya dalam pendidikan saat ini adalah dengan cara menyekolahkan pada kejar paket A, B atau C. Kejar paket A, B, dan C pada saat ini memang menjadi perbincangan masyarakat. Kejar peket ini biasanya menjadi alternative di tengah keraguan terhadap mutu pendidikan nasional, baik dilihat dari mahalnya biaya sekolah berstandar internasional atau yang lainnya.

Pendidikan Kesetaraan dalam pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Selain itu kita dibekali beberapa keterampilan yang memadai untuk terjun dalam bermasyarakat. Tapi realita sekarang banyak orang yang mengikuti kejar paket hanya berorientasi pada ijazah dan kebanyakan yang mengikutinya adalah orang-orang yang tidak lulus dari sekolah formal. Dari permasalahan inilah pemakalah akan mencoba menuangkan pemecahan ataupun solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada lembaga pendidikan nonformal.

## Pembahasan

### 1. Pentingnya Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah salah satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.<sup>2</sup> Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

<sup>1</sup>Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1

<sup>2</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat 1

(PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan sanggar pendidikan.<sup>3</sup>

Dengan munculnya pendidikan non-formal, diharapkan anak-anak akan memperoleh lebih banyak nilai dan pengetahuan dibandingkan yang mereka terima di lingkungan sekolah dan rumah. Padahal, pendidikan nonformal mempunyai peran pendukung terhadap pendidikan formal, baik negeri maupun swasta. Pendidikan nonformal juga menunjang pendidikan nonformal yang seharusnya diperoleh anak dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini pendidikan agama, budi pekerti, akhlak, budi pekerti, etika dan sosialisasi harus diajarkan oleh orang tua terlebih dahulu.

Kehadiran berbagai lembaga mulai PAUD dan lembaga pendidikan nonformal lainnya yang beredar di sekitar masyarakat menunjukkan betapa pedulinya oknum pendidik nonformal terhadap dunia pendidikan nonformal. Ini akan sangat membantu para orang tua yang menginginkan nilai lebih yang dihasilkan anak-anak mereka sebagai bentuk pendukung pendidikan formal yang anak terima di sekolah.<sup>4</sup>

Pemberian program A, B, dan C melalui pendidikan nonformal turut membangkitkan semangat masyarakat yang belum tamat sekolah formal karena peraturan pemerintah yang mengamanatkan gelar mereka setara dengan kualifikasi anak yang bersekolah di sekolah reguler. Kemunculan beberapa PAUD cukup meringankan beban orang tua yang sebagian besar waktunya untuk berkarir. Banyak kursus dan fasilitas bimbingan belajar yang semakin populer di masyarakat yang dapat memperkaya dan melengkapi ilmu pengetahuan yang diperoleh anak di sekolah formal.

Lembaga pendidikan nonformal bersaing untuk memberikan keunggulan pada masing-masing lembaga. Banyak orang tua yang berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke lembaga layanan pendidikan nonformal tersebut dengan harapan agar anaknya mendapat pendidikan tambahan yang layak dan berkualitas untuk melengkapi kebutuhan pendidikan formalnya. Oleh karena itu sudah selayaknya orang tua bersikap selektif dalam lembaga kursus dan bimbingan belajar yang tepat untuk anak-anak mereka mengingat kian maraknya keberadaan layanan pendidikan nonformal yang hanya berasas manfaat.<sup>5</sup>

## 2. Pemecahan Pendidikan Nonformal Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Berbicara tentang pendidikan baik dalam cakupan nasional, propinsi, kabupaten, dan tingkat pedesaan, tentunya mengkaji mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Namun yang menjadi pembahasan yang menguat dalam pendidikan tidak adanya kesamaan dalam memberikan perhatian pemerintah dalam pendidikan baik itu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Hal ini dalam makalah ini hanya membahas solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pendidikan nonformal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka dan buta Bahasa Indonesia. Akan

<sup>3</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan..., Pasal 26 ayat 3-5

<sup>4</sup>Sudjana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas* (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 49-52

<sup>5</sup>Sudjana, *Pendidikan Nonformal...*, hlm. 312

tetapi permasalahan pendidikan nonformal semakin meluas seperti: ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan noformal ketidakjelasan standar-standar penjaminan mutu dalam pendidikan nonformal, ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang belum profesional, dan kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal.<sup>6</sup>

Maka dari itu permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan nonformal harus secepatnya untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam makalah ini akan diuraikan solusi untuk mengatasi permasalahan itu, sebagai berikut:

a. Membangun Citra Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal

Pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas PKBM masih kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang perlu dilayani dan yang membutuhkan program pendidikan nonformal. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan lebih lanjut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PKBM ke depan, baik itu pendataan kuantitas PKBM, mendorong masyarakat untuk membuat PKBM, melaksanakan program akreditasi, dan memberikan pengakuan terhadap lembaga yang dikembangkan oleh PKBM.

Pengakuan tersebut dilakukan agar reputasi dan citra PKBM semakin baik di masa yang akan datang. Selain itu, pemerintah juga harus serius mengembangkan dan memajukan PKBM dan lembaga pendidikan nonformal lainnya, termasuk membuat peraturan khusus untuk memperkuat lembaga tersebut..<sup>7</sup>

Hal terpenting yang perlu dilakukan Pemerintah adalah berkoordinasi dengan pengurus PKBM untuk menata kembali struktur dan organisasi PKBM agar kekuatan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan PKBM lebih profesional. Selain penguatan PKBM, pemerintah juga harus memperkuat organisasi lain dan mendorong masyarakat untuk ikut mengembangkan model organisasi lain yang melayani program pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Misalnya model pengembangan visi dan misi, tujuan pendidikan, pengembangan konten, metode dokumentasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, layanan pendidikan nonformal jenis ini memerlukan peraturan atau standarisasi khusus agar pengembangan model ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Organisasi yang khusus mengembangkan penawaran program pendidikan nonformal, baik PKBM maupun lainnya, harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin keberlanjutan program, serta pengembangan program multidisiplin. membangun kemandirian masyarakat.<sup>8</sup>

Dukungan pemerintah perlu lebih realistis, terutama dalam hal dukungan hukum terkait penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Hal ini tidak hanya terfokus pada satuan dan lembaga yang ada, namun juga memerlukan jalur antar lembaga yang

<sup>6</sup>[https://www.kompasiana.com/miss\\_vera/pendidikannonformal\\_551047088133115d3bbc5fc](https://www.kompasiana.com/miss_vera/pendidikannonformal_551047088133115d3bbc5fc). Diakses tanggal 13 Desember 2017

<sup>7</sup>[https://www.kompasiana.com/miss\\_vera/pendidikannonformal\\_551047088133115d3bbc5fc](https://www.kompasiana.com/miss_vera/pendidikannonformal_551047088133115d3bbc5fc) Diakses tanggal 13 Desember 2017

<sup>8</sup>Kadir Sardjan, *Perencanaan Pendidikan Nonformal*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 107-109

lebih luas, sehingga kualitas lulusan yang dididik tidak lagi terbatas pada kebutuhan saat ini saja. Sikap proaktif program ini akan membantu pendidikan non-formal untuk terus bertahan dalam beragamnya kebutuhan masyarakat saat ini, yang memasuki desa global.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal

Seperti yang telah dijelaskan di awal, kehadiran pendidikan nonformal tentunya diharapkan dan diharapkan dapat memberikan kualitas layanan terbaik yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu pendidikan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang handal sangat diperlukan.

Keberlanjutan dan efektivitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal akan sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalismenya, terutama dalam menyelenggarakan program pembelajaran di luar sistem persekolahan yang memerlukan lebih banyak terobosan dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan, peluang dan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup>

Persyaratan pendidikan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memajukan dan mengembangkan pembelajaran di luar sistem sekolah juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kesempatan belajar yang mungkin, tentunya sesuai dengan kebutuhan, peluang dan aspirasi siswa atau warga belajar.

Oleh karena itu, diperlukan adanya tingkat kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal yang dikelola secara profesional. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelarasan standar kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan nonformal dengan kebutuhan profesionalisasi program layanan pendidikan di luar sistem persekolahan.

Hal ini sesuai dengan gagasan pokok yang menciptakan peminatan pendidikan di luar sistem persekolahan sebagai bidang penyelidikan ilmiah dan bidang profesional yang terpisah. Kehadiran bidang khusus ini sejak awal bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar sistem sekolah, apapun tujuannya, apapun penyelenggara dan siswanya.<sup>10</sup>

Merujuk ke arah pemikiran di atas, peningkatan kualifikasi akademik dan pendidikan profesi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dihadapkan ke dalam berbagai tantangan dan perkembangan mutakhir pendidikan nonformal, yang menyangkut keragaman peserta didik atau warga belajar keragaman program dan perkembangan mutakhir model-model pembelajaran.

Ada pula dampak pasar dan perlunya program pendidikan non-formal yang berkelanjutan, dimana peran pendidikan non-formal adalah sebagai jembatan antara pendidikan formal dan dunia kerja. Hal ini akan menjadi lebih jelas apabila didukung oleh para pendidik yang berketerampilan tinggi dan terspesialisasi serta tenaga pendidikan nonformal.

<sup>9</sup>Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

<sup>10</sup>Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia...*, hlm. 29

Secara khusus, pelatihan profesi pendidik nonformal perlu ditata kembali, terutama perancangan sistem manajemen pendidikan bagi pendidik di lingkungan pendidikan nonformal, dan model program pengajaran serta penguatan tenaga pengajar di fasilitas tersebut dan jangan hanya memantau apa yang terjadi. telah dilaksanakan melalui pelatihan profesional formal bagi guru, sehingga penetapan kerangka hukum dan pengembangan standar manajemen harus diintegrasikan dan konstruksi dimulai.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, akan ditentukan sistem kualifikasi profesi pendidik pada pendidikan nonformal, pengelolaan sumber daya pendidikan pada pendidikan nonformal, serta model insentif yang akan diterapkan, khususnya mengenai reputasi dan keuangan.

Pendidik harus memahami dan menginternalisasikan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut oleh PKBM; meningkatkan kapasitas pengajaran metodologis dan didaktik di luar sekolah; menyusun rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek terkait dengan proses pembelajaran di PKBM; dan bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.

### c. Standarisasi Program Pendidikan Nonformal

Standar nasional pendidikan merupakan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai pendidikan bermutu nasional. Standar pendidikan nasional bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter serta peradaban bangsa.

Atas dasar itu maka seluruh kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan seperti: program (isi dan proses), pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara (pengelola), kebutuhan prasarana, keterampilan lulusan, penilaian finansial dan pendidikan, semuanya mengacu pada standar yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Namun, saat ini dinilai sangat sulit bagi lembaga pendidikan nonformal untuk memenuhi standar minimal sekalipun. Mengingat masih banyak satuan pendidikan nonformal yang terpuruk, apalagi terkena dampak teknologi informasi yang semakin canggih, atau bersaing menjadi penyelenggara pendidikan nonformal bagi penyelenggara pendidikan nonformal sekolah formal bertaraf internasional seperti sekolah reguler, mendapatkan bahan ajar yang representatif saja sudah menjadi tugas yang sulit.

jarang dan bahkan hanya dalam mimpi. Jika kondisi ini dikaitkan dengan jenjang pendidikan nonformal yang ditetapkan, kapan PKBM dan satuan pendidikan nonformal lainnya berkualitas, proses pembelajaran akan stagnan, lulusan akan berketerampilan tinggi dan siap menghadapi masa depan jika kondisi tersebut terus berlanjut.

Oleh karena itu diperlukan intervensi para pemikir, praktisi pendidikan non-formal, dan agen reformasi pendidikan, sehingga dapat mendorong masyarakat, swasta, dan organisasi lain untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan non-formal dan Pendidikan formal. satuan pengajaran yang

<sup>11</sup><http://pkbmbinainsankamil.sch.id/2016/07/01/apakah-masalah-dan-tantangan-dan-solusi-pendidikan-non-formal/>

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab Tentang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2 ayat 1

lebih representatif dan selaras dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Selain itu juga memperkuat peran penjamin mutu pendidikan nonformal, sebagai pengembang model program, model pembelajaran dan peran lainnya untuk terus aktif dan kolaboratif berkolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi terkait lainnya.

Agar pendidikan nonformal senantiasa membantu masyarakat, mendukung penyelenggara pendidikan nonformal, serta mendukung dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan. Terakhir, pendidikan nonformal yang bermutu bukan sekedar khayalan belaka, namun benar-benar dapat diwujudkan sesuai persyaratan standar nasional pendidikan, khususnya dengan kemampuan menghasilkan lulusan yang mandiri, mapan dan bermartabat..<sup>14</sup>

#### d. Meningkatkan Reputasi Akademik

Modal utama tenaga profesional pendidikan nonformal untuk dapat mengembangkan program, mengembangkan pembelajaran, membangun jejaring, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengelola program Pendidikan Non Formal secara efektif dan menjanjikan adalah dihasilkan melalui Perguruan Tinggi yang juga bermutu tinggi dan unggul. Karena Perguruan Tinggi itulah yang selama ini membina dan mengembangkan konsep pengembangan pendidikan nonformal secara utuh sesuai dengan tuntutan lapangan.

Meningkatnya dalam teknologi pembelajaran pendidikan nonformal, beragamnya satuan penyelenggara pendidikan nonformal, beragamnya jenis program yang dikembangkan, permasalahan-permasalahan pendidikan nonformal, semakin tingginya tuntutan akan layanan pendidikan nonformal serta tuntutan pemerintah dan masyarakat akan mutu profesi pendidikan nonformal, maka seyogyanya perguruan tinggi yang memiliki jurusan PLS perlu melakukan berbagai pembaharuan.<sup>15</sup>

Salah satu pembaharuan yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali visi, misi dan tujuan yang selaras dengan perkembangan pendidikan nonformal saat ini. Untuk menjawab hal itu diperlukan rencana aksi, berbagai terobosan, riset, pengkajian berbagai ilmu, teori dan model-model praktik yang selama ini telah dikembangkan di dunia pendidikan nonformal. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan adalah:

- 1) Mengembangkan visi masa depan pendidikan luar sekolah sebagai satu-satunya jurusan yang membidangi dan menghasilkan lulusan yang secara profesional dan kompeten dalam bidang pendidikan nonformal.
- 2) Mengkaji kembali struktur dan isi kurikulum jurusan pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan tuntutan profesi pendidikan nonformal dan perkembangan mutakhir

<sup>13</sup>Santoso, *Pendidikan Masyarakat* (Bandung: Rosdakarya Cipta, 2006), hlm. 152

<sup>14</sup>Santoso, *Pendidikan Masyarakat...*, hlm. 155

<sup>15</sup>Sutaryat Trisnamansyah, *Pengantar Pendidikan Luar Sekolah* (Jakarta: Universitas Terbuka Kurnia, 2000),

keilmuan dan teori-teori pendidikan terutama keilmuan dan teori pendidikan nonformal.

- 3) Meningkatkan reputasi akademik jurusan melalui berbagai kegiatan; penelitian, penerbitan jurnal terakreditasi, penulisan buku-buku
- 4) Pendidikan Nonformal dalam mengembangkan model-model pembelajaran berdasar pada prinsip *andragogi* sehingga model-model tersebut dapat diakses secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, melakukan seminar-seminar nasional dan internasional, melakukan kerjasama nasional dan internasional, mengembangkan manajemen profesional untuk mencapai standar nasional pendidikan, sertifikasi organisasi internasional, akreditasi BAN dan akreditasi badan atau asosiasi profesi nasional dan internasional, HAKI, dan standar internasional lainnya.<sup>16</sup>
- 5) Menguatkan kembali laboratorium belajar masyarakat, sebagai tempat program latihan profesi mahasiswa, baik melalui desa PLS, kampung PLS maupun bentuk lain yang serupa.
- 6) Menggairahkan kembali asosiasi-asosiasi profesi pendidikan nonformal, sebagai wadah penyalur aspirasi profesi pendidikan nonformal dan penjaminan mutu melalui asosiasi profesi.
- 7) Melakukan pertemuan berkala antar teman sejawat di lingkungan Jurusan PLS, untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan nonformal terutama penguatan profesi pendidikan nonformal, melalui berbagai kajian ilmiah, kompetensi.
- 8) Dengan beragamnya jenis dan bentuk layanan pendidikan nonformal, dirasa perlu Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dikembangkan menjadi sebuah Fakultas PLS, namun demikian untuk menuju kearah itu perlu pengkajian (penelitian) yang mendalam dan strategis agar keberadaan Fakultas PLS betul-betul dibutuhkan dan mampu menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan pendidikan nonformal ke depan.<sup>17</sup>

## Kesimpulan

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Negara Indonesia, pendidikan memiliki peranan terpenting di dalamnya. Pendidikan menjadi tolak ukur majunya suatu Negara, maka lembaga pendidikan di Indonesia terdapat di dalamnya pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan Informal.

Pemerintah dalam pelaksanaannya hanya terfokus kepada pendidikan formal baik dari sarana prasarana, kualitas pendidikan, kualitas pendidik. Maka terjadi kesenjangan terhadap pendidikan nonformal dan informal. Untuk itu terjadi problematika dalam pendidikan nonformal, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus secara cepat dituntaskan. Maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada lembaga pendidikan formal, yaitu sebagai berikut:

<sup>16</sup>Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal: Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: UNNES press, 2007), hlm. 95

<sup>17</sup>Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal...*, hlm. 97.

1. Membangun Citra Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal harus memunculkan citranya dengan menawarkan keunggulan lembaganya, maka minat masyarakat dalam memasukkan anaknya akan semakin tinggi.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal

Dalam lembaga pendidikan nonformal perlu meningkatkan kualitas pendidikannya. Pengelola pendidikan nonformal dalam mengembangkan lembaganya harus memiliki pendidik yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Pendidik juga seharusnya harus mendapatkan perhatian seperti yang ada di pendidikan formal. Begitu juga dengan tenaga kependidikannya harus memiliki keterampilan dalam menjalankan tugasnya.

3. Standarisasi Program Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal harus mengikuti standarisasi pendidikan nasional, harus selalu berbenah demi kemajuan. Pendidikan nonformal harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti yang ada dalam pendidikan formal. Walaupun masih jauh dari harapan, tetapi harus tetap membenahi, mengembangkan, dan meningkatkan standar sesuai yang dicantumkan dalam undang-undang. Karena Lulusan Pendidikan nonformal yang kini dianggap kelas dua harus pula diperbaiki. Dengan demikian akan memberikan nilai positif bagi jalur Pendidikan nonformal di tengah masyarakat.

4. Meningkatkan Reputasi Akademik bagi Jurusan PLS

Pendidikan luar sekolah sama juga dengan pendidikan nonformal, artinya sama-sama dilakukan di luar jam sekolah formal. Pembahasan-pembahasan dan pengkajian tentang pendidikan nonformal sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk mengkaji kembali posisi pendidikan nonformal, visi-misinya, kurikulumnya, metode, dan materinya, dan lain sebagainya. Dengan berbagai-solusi yang ditawarkan dalam pemecahan yang selama ini ada dalam pendidikan nonformal dapat diselesaikan dengan baik. Maka diharapkan pendidikan nonformal dapat berkembang seperti majunya pendidikan formal.

**Daftar Pustaka**

Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

[Http://pkmbmbinainsankamil.sch.id/2016/07/01/apakah-masalah-dan-tantangan-dan solusi pendidikan-non-formal.](http://pkmbmbinainsankamil.sch.id/2016/07/01/apakah-masalah-dan-tantangan-dan-solusi-pendidikan-non-formal)

[Https://www.kompasiana.com/miss\\_vera/pendidikannonformal\\_551047088133115d3bbc5fc.](https://www.kompasiana.com/miss_vera/pendidikannonformal_551047088133115d3bbc5fc)

Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal: Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Semarang: UNNES press, 2007.

Kadir Sardjan, *Perencanaan Pendidikan Nonformal*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Santoso, *Pendidikan Masyarakat*, Bandung: Rosdakarya Cipta, 2006.

Sudjana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, Bandung: Falah Production, 2004.

Sutaryat Trisnamansyah, *Pengantar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Universitas Terbuka Kurnia, 2000.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab Tentang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.